



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 865484

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.947.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/166 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 501.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/131 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 321.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 71.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 274.609.836

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.334.609.836



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.334.609.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.